



## Model Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough

Ajeng Ratna Permana<sup>1</sup>, Agus Hamdani<sup>2</sup>

Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
Institut Pendidikan Indonesia Garut

---

### Abstract

Received: 05 September 2025

Revised: 17 September 2025

Accepted: 28 September 2025

*Jurnal ini menganalisis teks berita berjudul "Dugaan Korupsi Pertamina, Modus Lama dengan Pemain Baru" yang diterbitkan di Kompas.com pada 03 Maret 2025, dengan menggunakan model Analisis Wacana Kritis (AWK) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami bagaimana wacana dalam berita tersebut mencerminkan ideologi, kekuasaan, dan pengaruhnya terhadap persepsi publik mengenai korupsi di sektor BUMN, khususnya Pertamina. Melalui pendekatan Fairclough yang mencakup analisis tiga dimensi yaitu teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Jurnal ini mengungkapkan bahwa penggunaan bahasa yang kuat dan naratif yang konsisten dalam berita berfungsi untuk membentuk opini publik dan menyoroti ketidakpuasan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa frasa-frasa kunci dalam teks tidak hanya menggambarkan fakta kasus korupsi, tetapi juga menciptakan citra negatif terhadap institusi dan pelaku yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan peran penting media dalam mendorong kesadaran masyarakat dan reformasi dalam menangani isu-isu korupsi di Indonesia. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada studi lebih lanjut mengenai hubungan antara media, wacana, dan perubahan sosial di konteks politik Indonesia.*

**Keywords:** Analisis Wacana Kritis, Korupsi di BUMN, Media dan Kekuasaan

(\*) Corresponding Author:

**How to Cite:** Permana, A., & Hamdani, A. (2025). Model Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(10.A), 57-64. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12596>.

---

## PENDAHULUAN

Rangkaian kasus korupsi yang melibatkan Pertamina dalam beberapa tahun terakhir semestinya menjadi titik tolak untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem tata kelola perusahaan tersebut. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis yang bergerak dalam sektor energi, Pertamina memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam nasional. Namun, kenyataannya, praktik-praktik penyimpangan yang dilakukan di dalam tubuh Pertamina justru memperlihatkan betapa lemahnya sistem pengawasan dan transparansi dalam pengambilan keputusan strategis. Kasus-kasus yang terungkap menunjukkan bahwa meskipun pola korupsinya tidak tergolong baru, aktor-aktor yang terlibat terus berganti, mengindikasikan adanya keberlanjutan sistemik dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam kurun satu dekade terakhir, tercatat setidaknya enam kasus besar korupsi yang melibatkan anak perusahaan maupun pejabat tinggi di lingkungan Pertamina. Kasus pertama adalah dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas

(LNG) pada periode 2011–2014, yang menjerat mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan. Ia disinyalir mengambil keputusan pembelian LNG secara sepihak tanpa melalui prosedur analisis kelayakan dan risiko yang memadai. Akibatnya, negara mengalami kelebihan pasokan LNG yang tidak terserap oleh pasar, menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 2,1 triliun. Mahkamah Agung kemudian memperberat hukumannya menjadi 13 tahun penjara, mencerminkan bobot kesalahan serta dampak finansial yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

Kasus kedua terjadi di anak usaha Pertamina, yakni Pertamina Energy Services Pte. Ltd (PES), yang berkaitan dengan gratifikasi dalam perdagangan minyak mentah dan produk kilang. Dalam perkara ini, Bambang Irianto, yang menjabat sebagai Managing Director PES periode 2009–2013, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2019. Ia diduga menerima gratifikasi sebesar 2,9 juta dolar AS (sekitar Rp 40,75 miliar) dari pihak swasta sebagai imbalan atas bantuan dalam pengaturan proyek-proyek migas. Skandal ini sempat menarik perhatian Presiden Joko Widodo karena penanganannya memakan waktu cukup panjang, sejak awal penyelidikan pada 2014 hingga penetapan tersangka pada 2019, menunjukkan adanya hambatan struktural dalam penegakan hukum di sektor strategis.

Kasus ketiga berkaitan dengan pengelolaan dana pensiun Pertamina. Pada tahun 2017, Kejaksaan Agung menetapkan Muhammad Helmi Kamal Lubis, Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina periode 2013–2015, sebagai tersangka dalam perkara pembelian saham PT Sugih Energy Tbk (SUGI) senilai Rp 601 miliar. Ia diduga bekerja sama dengan Edward Seky Soeryadjaya, putra pendiri Astra International, untuk mengarahkan investasi dana pensiun ke saham yang memiliki kinerja buruk. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa transaksi tersebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp 599 miliar. Kasus ini menunjukkan bagaimana dana sosial yang seharusnya menjamin kesejahteraan pegawai justru dimanfaatkan sebagai sarana spekulasi oleh elit korporasi.

Kasus keempat berkaitan dengan investasi Pertamina di Blok Basker Manta Gummy (BMG), Australia, yang terjadi pada tahun 2009 namun diusut pada 2018. Melalui anak usahanya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Pertamina membeli saham sebesar 10% di perusahaan ROC Oil Ltd dengan asumsi produksi minyak sebesar 812 barrel per hari. Namun, realisasi produksi hanya sekitar 252 barrel per hari, dan pada tahun berikutnya blok tersebut ditutup karena tidak ekonomis. Investasi sebesar Rp 568 miliar itu akhirnya menjadi beban negara akibat kelalaian dalam due diligence dan evaluasi keekonomian proyek.

Kasus kelima mencuat pada awal 2025, saat KPK menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina yang berlangsung pada 2018–2023. Digitalisasi ini seharusnya menjadi langkah maju dalam efisiensi distribusi dan pengawasan bahan bakar, namun justru menjadi ladang korupsi. Penyidikan dimulai dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada September 2024, dan KPK telah menetapkan tersangka, meskipun identitasnya belum dipublikasikan.

Kasus keenam dan yang terbaru adalah skandal tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018–2023. Dugaan korupsi ini menyeret

sejumlah pejabat tinggi dari berbagai lini Pertamina dan perusahaan mitra, seperti PT Pertamina Patra Niaga dan PT Kilang Pertamina Internasional. Skema korupsi yang terungkap melibatkan pembelian bahan bakar berkualitas lebih rendah (RON 90/Pertalite) yang kemudian dicampur untuk dijual sebagai RON 92 (Pertamax), dengan harga yang lebih tinggi. Praktik manipulatif ini menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, diperkirakan mencapai Rp 193,7 triliun pada 2023.

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, menyatakan bahwa praktik korupsi yang terjadi di Pertamina merupakan pengulangan modus lama dengan pelaku baru. Ia menggarisbawahi tiga faktor utama yang menyebabkan suburnya korupsi di tubuh Pertamina: dominasi pasar Pertamina dalam distribusi energi nasional, tingginya nilai transaksi yang memungkinkan permainan margin keuntungan, serta lemahnya respons dan pengawasan dari para pemegang otoritas seperti Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM.

Secara lebih luas, korupsi merupakan persoalan krusial yang tidak hanya menggerogoti fondasi ekonomi negara, tetapi juga merusak legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. BUMN seperti Pertamina, yang berada di garis depan pengelolaan kekayaan alam, seharusnya menjadi teladan dalam transparansi dan tata kelola yang baik. Namun kenyataannya, praktik korupsi justru mencerminkan krisis dalam akuntabilitas dan etika birokrasi.

Berita yang dimuat Kompas.com pada 3 Maret 2025 dengan judul “Dugaan Korupsi Pertamina, Modus Lama dengan Pemain Baru” menyoroti hal ini secara tajam. Selain menyampaikan kronologi fakta hukum, berita ini juga membingkai narasi yang dapat membentuk opini publik tentang citra institusi dan pejabat negara.

Untuk memahami bagaimana wacana ini terbentuk, digunakanlah pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) dari Norman Fairclough. Model ini mengkaji bagaimana bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai mekanisme pembentuk ideologi, kekuasaan, dan struktur sosial. Dengan memeriksa tiga dimensi utama—struktur teks, praktik diskursif (produksi dan konsumsi teks), serta praktik sosial—penelitian ini berupaya mengungkap relasi kuasa yang tersembunyi dalam wacana media.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi strategi linguistik dan naratif yang digunakan media dalam menyusun pemberitaan kasus korupsi di Pertamina, serta menelaah bagaimana hal itu membentuk kesadaran publik dan memengaruhi dinamika sosial-politik. Dengan pendekatan ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana media massa berfungsi bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen konstruksi realitas sosial dalam masyarakat demokratis.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) dari Norman Fairclough untuk menganalisis berita terkait dugaan korupsi di Pertamina. Analisis ini mengeksplorasi hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan konteks sosial melalui tiga dimensi utama: analisis teks, praktik wacana, dan praktik sosial budaya. Dalam analisis teks, penelitian menyoroti pilihan kata, representasi, relasi, identitas, serta gaya penulisan dalam berita untuk memahami bagaimana isu korupsi dikonstruksi dalam wacana media.

Intertekstualitas dalam berita ini menunjukkan bahwa teks tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan berbagai sumber, seperti laporan resmi dan wacana publik mengenai korupsi. Berita ini memperkuat narasi bahwa korupsi di sektor BUMN bersifat sistemik dan telah berlangsung lama. Selain itu, keterlibatan media lain, termasuk media sosial, memperluas diskusi publik mengenai isu ini dan memengaruhi persepsi masyarakat.

Praktik wacana mencermati bagaimana berita diproduksi, didistribusikan, dan diterima oleh publik. Produksi teks melibatkan berbagai aktor, seperti jurnalis, editor, dan lembaga antikorupsi. Penyebaran berita melalui berbagai platform media memungkinkan reaksi publik yang dapat memperkuat tekanan terhadap pemerintah untuk menindaklanjuti kasus ini. Respon masyarakat dalam bentuk komentar dan diskusi di media sosial juga menunjukkan bahwa wacana ini memiliki dampak yang luas.

Dari perspektif sosial budaya, berita ini mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap pengelolaan BUMN dan tuntutan akan transparansi serta akuntabilitas. Dinamika politik turut berperan dalam membentuk wacana ini, dengan korupsi menjadi isu utama dalam tuntutan reformasi. Selain itu, media sosial semakin memperkuat wacana ini dengan membuka ruang diskusi yang lebih luas dan memungkinkan mobilisasi sosial.

Analisis ini menunjukkan bahwa berita tentang dugaan korupsi di Pertamina bukan sekadar laporan jurnalistik, tetapi juga bagian dari konstruksi sosial yang memengaruhi opini publik. Dengan memahami bagaimana bahasa digunakan dalam wacana ini, kita dapat melihat bagaimana isu korupsi dikemas, dipersepsikan, dan berpotensi memengaruhi kebijakan serta tindakan publik terhadap reformasi di sektor BUMN.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Deskriptif**

Penelitian ini mengkaji wacana berita berjudul “Dugaan Korupsi Pertamina, Modus Lama dengan Pemain Baru” dengan menggunakan model analisis Norman Fairclough yang terdiri atas tiga dimensi: analisis teks, praktik diskursif, dan praktik sosial.

#### **1. Dimensi Teks**

Analisis terhadap struktur dan pilihan bahasa dalam berita menunjukkan penggunaan diksi yang kuat, evaluatif, dan sarat makna ideologis. Kata-kata seperti “penggerogoti keuangan negara”, “modus lama”, dan “kerugian negara” merefleksikan strategi linguistik untuk menggambarkan kejahatan korupsi sebagai masalah yang sistemik, kronis, dan berulang. Judul berita sendiri, yang menyandingkan “modus lama” dengan “pemain baru”, secara implisit menyampaikan bahwa pola korupsi di tubuh Pertamina adalah sebuah siklus yang terus beregenerasi meskipun individu pelaku silih berganti. Kalimat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai informasi, tetapi juga sebagai pembingkai opini.

Struktur kalimat yang digunakan cenderung aktif, padat, dan langsung—hal ini menunjukkan niat media untuk menegaskan keberadaan masalah secara konkret. Misalnya, pernyataan seperti “Proses penyidikan masih berlangsung” dan “kerugian negara diperkirakan mencapai triliunan rupiah” tidak hanya menyampaikan fakta hukum, tetapi juga menekankan signifikansi dan urgensi

kasus. Dalam kerangka Fairclough, hal ini mencerminkan bagaimana bentuk bahasa mencerminkan kekuasaan wacana dan posisi media dalam membentuk persepsi.

Selain itu, gaya penulisan yang menggabungkan informasi investigatif, opini naratif, dan kutipan dari lembaga penegak hukum menambah kredibilitas serta menekankan keseriusan kasus. Pencantuman data waktu, nama pejabat, dan jumlah kerugian negara secara spesifik menjadi strategi untuk membentuk persepsi pembaca terhadap fakta sebagai sesuatu yang valid dan obyektif.

## **2. Dimensi Praktik Diskursif**

Pada tataran praktik diskursif, teks berita ini menunjukkan adanya intertekstualitas yang tinggi, di mana narasi antikorupsi disusun dengan merujuk pada berbagai sumber wacana, termasuk pernyataan lembaga penegak hukum (KPK, Kejaksaan), pengamat kebijakan publik, serta dokumen audit negara. Penyusunan ini menunjukkan bahwa media secara sadar membangun narasi dengan “meminjam otoritas” dari lembaga-lembaga tersebut untuk memperkuat legitimasi informasi yang disampaikan.

Media juga melakukan strategi reproduksi dan artikulasi ulang terhadap isu korupsi Pertamina sebagai “sindrom sistemik”, bukan hanya penyimpangan individu. Ini terlihat dari penyusunan narasi yang menghubungkan enam kasus korupsi dalam satu dekade terakhir, menunjukkan kesinambungan dan pola. Dengan demikian, media tidak hanya menyampaikan peristiwa, tetapi juga memposisikan diri sebagai agen ideologis yang membingkai ulang realitas sosial.

Dari sisi produksi wacana, berita ini dapat dilihat sebagai bagian dari rutinitas jurnalisisme investigatif yang bertujuan mengungkap kasus dengan bobot informasi yang tinggi. Konsumsi wacana oleh publik—khususnya melalui kanal digital—menunjukkan bahwa media ini menyasar pembaca yang kritis terhadap isu-isu kebijakan publik dan tata kelola negara. Hal ini memperkuat posisi media sebagai aktor yang turut membentuk opini publik.

## **3. Dimensi Praktik Sosial**

Dalam dimensi praktik sosial, wacana ini mencerminkan konteks sosial-politik Indonesia yang sedang berupaya memperkuat sistem antikorupsi di tengah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap BUMN dan lembaga negara. Berita ini berperan sebagai respon diskursif terhadap realitas sosial yang lebih besar: kegagalan reformasi birokrasi dan lemahnya sistem pengawasan internal di institusi negara.

Narasi yang dibangun dalam berita secara tidak langsung mengajak pembaca untuk melihat korupsi sebagai kegagalan struktural, bukan sekadar moral individu. Dengan demikian, teks ini memiliki kekuatan untuk membentuk pemahaman kolektif bahwa perubahan tidak cukup dilakukan dengan pergantian aktor, melainkan harus menyasar sistem yang lebih dalam. Wacana ini sekaligus menempatkan media dalam posisi advokatif—mengusung narasi keadilan dan akuntabilitas sebagai tuntutan sosial yang tak dapat diabaikan.

Lebih lanjut, berita ini menunjukkan bahwa media tidak netral secara ideologis, melainkan berperan aktif dalam konstruksi sosial terhadap isu korupsi. Sejalan dengan pemikiran Fairclough, wacana menjadi bagian dari praktik sosial yang turut mempertahankan atau menantang struktur kekuasaan. Dalam hal ini, media melalui berita ini menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap lembaga publik dan negara.

## PEMBAHASAN

Analisis terhadap teks berita “Dugaan Korupsi Pertamina, Modus Lama dengan Pemain Baru” menunjukkan bahwa wacana media tidak sekadar menyampaikan informasi, melainkan membentuk dan mereproduksi pemaknaan sosial terhadap isu korupsi di tubuh BUMN. Pada dimensi teks, strategi bahasa yang digunakan memperlihatkan pemilihan diksi yang sarat makna ideologis, seperti “modus lama”, “penggerogoti”, dan “kerugian negara”, yang bertujuan untuk menanamkan kesan bahwa kasus ini bukan kejadian yang terisolasi, tetapi bagian dari pola sistemik. Bahasa dalam teks tidak netral; ia menjadi alat untuk membangun representasi sosial mengenai pelaku, korban, serta struktur kekuasaan yang terlibat dalam kasus tersebut. Dalam perspektif Fairclough, ini merupakan bentuk dari dominasi wacana—di mana struktur bahasa mewujudkan kepentingan ideologis tertentu.

Pada level praktik diskursif, berita ini menyusun narasi dengan mengandalkan intertekstualitas dari berbagai sumber, seperti pernyataan lembaga penegak hukum dan laporan investigatif sebelumnya. Hal ini memperkuat legitimasi berita sekaligus menegaskan bahwa wacana yang dibangun tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari jaringan wacana yang lebih luas. Media secara sadar memilih sumber dan kutipan yang tidak hanya informatif, tetapi juga kontekstual dan reflektif terhadap problem struktural. Narasi yang menyatukan berbagai kasus korupsi di Pertamina selama satu dekade terakhir merupakan strategi artikulasi ulang yang menggeser fokus dari individu pelaku menuju kritik sistemik terhadap institusi. Dengan demikian, media tidak sekadar menjadi saluran informasi, melainkan aktor diskursif yang aktif dalam proses konstruksi realitas sosial.

Dimensi praktik sosial dari wacana ini memperlihatkan bahwa teks media sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik yang melingkupinya. Dalam konteks Indonesia, korupsi merupakan persoalan struktural yang telah lama mengakar dalam birokrasi dan pengelolaan lembaga negara, termasuk BUMN seperti Pertamina. Berita ini hadir sebagai bagian dari perlawanan terhadap struktur dominan yang melanggengkan praktik korupsi. Media mengambil posisi sebagai “pengawas sosial” (social watchdog), dengan membentuk opini publik bahwa pergantian pelaku tanpa pembenahan sistem tidak akan menghentikan korupsi. Di sini, wacana media menjadi ruang dialektika antara keinginan publik akan perubahan dengan resistensi dari sistem kekuasaan yang mapan. Melalui konstruksi wacana semacam ini, media memberi tekanan moral dan politis terhadap pengambil kebijakan dan aparat penegak hukum agar bertindak lebih transparan dan tegas.

Selain itu, pemaknaan sosial atas korupsi yang dibangun dalam teks ini juga menunjukkan bagaimana wacana dapat menjadi alat untuk mengartikulasikan krisis kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dengan menekankan bahwa “modus lama” terus berulang dengan “pemain baru”, media secara tidak langsung mengungkap kegagalan institusi dalam melakukan reformasi internal yang substansial. Ini selaras dengan pandangan Fairclough bahwa wacana tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga memproduksi dan mentransformasikannya. Dalam konteks ini, wacana korupsi menjadi alat kritik sosial yang mendorong terjadinya perubahan dalam struktur sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa media bukan sekadar pelapor, melainkan aktor penting dalam arena pertarungan makna dan ideologi. Pemberitaan tentang dugaan korupsi di Pertamina menjadi wacana yang memiliki fungsi politis dan kultural, mencerminkan dinamika kuasa antara negara, masyarakat, dan media itu sendiri. Dalam kerangka analisis Fairclough, ini menunjukkan bahwa bahasa tidak pernah netral, dan setiap praktik berbahasa selalu terhubung dengan struktur sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, pemahaman kritis terhadap wacana menjadi penting agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga subjek aktif dalam membaca, menafsirkan, dan menggugat realitas sosial yang dibentuk oleh bahasa.

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Berdasarkan hasil analisis wacana kritis terhadap berita “Dugaan Korupsi Pertamina, Modus Lama dengan Pemain Baru” menggunakan model Norman Fairclough, dapat disimpulkan bahwa teks media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai arena produksi makna dan ideologi. Bahasa yang digunakan dalam teks mencerminkan konstruksi sosial yang menempatkan korupsi sebagai persoalan sistemik, bukan semata tindakan individu. Pemilihan diksi, struktur narasi, serta penggunaan intertekstualitas menjadi strategi diskursif untuk memperkuat pesan moral dan politis bahwa korupsi di tubuh BUMN telah berulang dengan pola yang sama meskipun aktornya berganti. Wacana tersebut membentuk kesadaran publik bahwa persoalan korupsi tidak akan selesai jika hanya dilakukan pergantian pelaku tanpa reformasi struktural yang nyata. Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa media memiliki peran penting dalam membentuk opini, menantang struktur kekuasaan, dan mendorong perubahan sosial.

#### **Implikasi**

Implikasi dari temuan ini cukup signifikan, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, studi ini memperkuat posisi pendekatan analisis wacana kritis sebagai alat untuk membongkar relasi kuasa yang tersembunyi dalam teks media, serta menegaskan bahwa bahasa merupakan medium yang sarat dengan muatan ideologis. Secara praktis, temuan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi jurnalis, akademisi, dan masyarakat umum tentang pentingnya membaca teks media secara kritis. Media diharapkan tidak hanya menjadi penyambung lidah kekuasaan, melainkan juga aktor transformasi sosial yang mampu menyuarakan kepentingan publik dan mendorong akuntabilitas institusional. Bagi pembuat kebijakan, wacana semacam ini dapat menjadi cermin bagi evaluasi sistemik dan pemicu perubahan regulasi, khususnya dalam pengawasan dan tata kelola BUMN agar tidak lagi menjadi sarang praktik korupsi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Haryanti, P. S., & Prabowo, D. (2025). Dugaan Korupsi Pertamina, Modus Lama dengan Pemain Baru. Kompas.com. Diakses dari [https://nasional.kompas.com/read/2025/03/03/06514481/dugaan-korupsi-pertamina-modus-lama-dengan-pemain-baru?utm\\_source=Various&utm\\_medium=Referral&utm\\_campaign=TopDesktop](https://nasional.kompas.com/read/2025/03/03/06514481/dugaan-korupsi-pertamina-modus-lama-dengan-pemain-baru?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=TopDesktop)

- Eriyanto. (2011). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Fairclough, N. (2010). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. New York: Routledge.
- Kress, G., & van Leeuwen, T. (2006). *Reading Images: The Grammar of Visual Design*. London: Routledge.
- Wodak, R., & Meyer, M. (2016). *Methods of Critical Discourse Studies*. London: Sage Publications.
- Rakhmani, I. (2020). Media dan Korupsi: Analisis Wacana Berita tentang Kasus Korupsi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 123-140.